

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kemajuan industri di Tiongkok memerlukan dukungan bahan mentah yang tidak bisa didukung di dalam negeri. Situasi ini membuat Tiongkok berupaya untuk mencari bahan mentah dari negara-negara lain, termasuk di Afrika. Kobalt merupakan elemen penting dalam pengembangan teknologi strategis modern seperti industri baterai, mesin jet, katalis minyak bumi, pendukung sektor konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Di Tiongkok, Kobalt juga digunakan untuk memproduksi baterai lithium-ion untuk memproduksi ponsel dan kendaraan listrik.¹ Kebutuhan besar akan Kobalt mendorong Tiongkok bekerjasama dengan Kongo sebagai suplier, yang dikukuhkan dalam perjanjian *Sicomines* yang ditujukan untuk keuntungan kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian ini justru menimbulkan ketergantungan Kongo kepada Tiongkok. Ketergantungan ini tidak semata-mata karena ketimpangan kapasitas antara kedua negara, namun juga karena desain perjanjian dan dominasi Tiongkok.

Tiongkok hanya memiliki saham di tiga dari sepuluh negara penghasil kobalt terbesar di dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo 67,9%, Indonesia

¹ Farrell Gregory and Paul J. Milas, “*China in the Democratic Republic of the Congo: A New Dynamic in Critical Mineral Procurement*,” 2024, <https://ssi.armywarcollege.edu/SSI-Media/Recent-Publications/Article/3938204/china-in-the-democratic-republic-of-the-congo-a-new-dynamic-in-critical-mineral/>.

16,3%, dan Papua Nugini 1,2%.² Dalam konteks tersebut, penguasaan Tiongkok atas rantai pasok kobalt global berlangsung sejalan dengan meningkatnya ekspansi ekonominya di berbagai negara berkembang, khususnya di Afrika yang memiliki cadangan mineral melimpah.

Di antara negara-negara berkembang yang memiliki pasokan kobalt, Republik Demokratik Kongo menempati posisi penting sebagai salah satu penghasil terbesar di dunia. Sejak tahun 1960, sebagian besar produksi kobalt global berpusat di negara ini.³ Maka dari itu Tiongkok bekerjasama dengan Republik Demokratik Kongo saat masa pemerintahan Presiden Joseph kabila melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* menghasilkan perusahaan patungan *Sino-Congolais des Mines (Sicomines)* yang disebut juga *The Sicomines Agreement*, dinegosiasikan pada masa pemerintahan Presiden Joseph Kabila dari tahun 2007-2009. Penandatanganan final *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tahun 2009 dengan Perusahaan asal Tiongkok yaitu *China Railway Engineering Corporation (CREC)* dan *Synohydro* serta Perusahaan Negara bernama *Gecamines* dan *Simco* dari Kongo. Pembagian saham dibagikan kepada 4 perusahaan tersebut.

Hasil kesepakatan berisikan Tiongkok memberikan investasi untuk infrastruktur dengan timbal balik hak eksplorasi mineral di Republik Demokratik

² Bruno Venditti, "China's Cobalt Supply Dominance by 2030," 2024, <https://www.visualcapitalist.com/chinas-cobalt-supply-dominance-by-2030/>.

³ Christof Baron, "Produksi Tambang Kobalt Di Republik Demokratik Kongo Dari Tahun 2010 Hingga 2023," 2024, <https://www.statista.com/statistics/339834/mine-production-of-cobalt-in-dr-congo/>.

Kongo.⁴ Kerja sama ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Sebagai gantinya, Kongo memberi Tiongkok hak eksplorasi tambang dengan imbalan bantuan dana dan pinjaman pembangunan.⁵ Dana untuk perjanjian ini diperoleh dari *China Export import Bank (EXIM Bank)*, pembiayaan total senilai US\$ 6 miliar dengan pembagian US\$ 3 miliar untuk pembiayaan infrastruktur dan US\$ 3 miliar untuk pertambangan kobalt. Selain itu, pembagian saham dari perjanjian ini disepakati, Tiongkok mendapatkan 68% dan Republik Demokratik Kongo mendapatkan 32%.

Perjanjian *Sino-Congolais des Mines (Sicomines)*, bentuk kerja sama yang menggabungkan skema konsorsium dan *joint venture* antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan perusahaan tambang milik negara Kongo. Pada tahap awal, dua perusahaan Tiongkok membentuk konsorsium untuk menjalankan proyek infrastruktur, konsorsium hanya terjadi di pihak Tiongkok sedangkan pihak Kongo (*Gecamines* dan *Simco*) hanya pemegang saham dalam *joint venture*. Kemudian kerja sama tersebut diwujudkan dalam pembentukan perusahaan patungan dengan pembagian saham 68% untuk pihak Tiongkok dan 32% untuk Kongo. Skema ini menunjukkan kemitraan, namun komposisi kepemilikan dan pengelolaan yang timpang mengindikasikan adanya relasi yang tidak seimbang dalam kerja sama pengelolaan sumber daya mineral tersebut.

⁴ Johanna Jansson, *The Sicomines Agreement: Change and Continuity in the Democratic Republic of Congo's International Relations*, 2011, <http://www.saiia.org.za/occasional-papers/the-sicomines-agreement-change-and-continuity-in-the-democratic-republic-of-congos-international-relations>.

⁵ Denta Utama, Mohamad Rosyidin, and Fendy Eko Wahyudi, "Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok Denta" 4, no. 1 (2022): 1–23.

Dalam perjanjian *Sicomines*, Tiongkok memandang Kongo sebagai mitra penting dan sumber daya vital bagi kebutuhan industrinya, terutama kobalt yang menjadi komponen utama teknologi energi baru. Terlihat dari data import kobalt, Tiongkok telah mengimpor kobalt dari tahun 2007-2023. Pada tahun 2007 Tiongkok mengimpor kobalt sejumlah 85.871 ton.⁶ Jumlah impor kobalt terbesar pada tahun 2011 mencapai 322.767 ton dan pada tahun 2023 mengimpor sejumlah 16.587 ton kobalt dari Kongo. Bagi Tiongkok, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi di Afrika dan menjamin pasokan bahan baku bagi sektor industrinya.

Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo awalnya memandang Tiongkok sebagai mitra strategis yang mampu membantu pemulihan ekonomi pascaperang melalui investasi besar dan pembangunan infrastruktur.⁷ Namun, seiring berjalannya waktu, Kongo mulai menyadari bahwa hubungan tersebut tidak seimbang karena keuntungan lebih banyak dinikmati pihak Tiongkok, sementara manfaat bagi masyarakat lokal sangat terbatas. Dari tahun 2008-2022, setelah lebih dari satu dekade kesepakatan berlangsung, keuntungan yang didapatkan pihak Tiongkok total sejumlah US\$ 11,6 miliar dengan jumlah yang diperoleh perusahaan Tiongkok US\$ 9,6 miliar dan Bank EXIM Tiongkok US\$ 1,2 miliar. Namun Republik Demokratik Kongo hanya mendapatkan US\$ 0,8 miliar.⁸ Sehingga mulai

⁶ World Integrated Trade Solution (WITS), “*Cobalt Ores and Concentrates Imports from Congo, Dem. Rep. in 2007*,” 2007, <https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2007/tradeflow/Imports/partner/ZAR/product/260500>.

⁷ Forum on China-Africa Cooperation, “*Interview: DR Congo President Considers China ‘Reliable Partner’ of Africa*,” 2024, https://2024focacsummit.mfa.gov.cn/eng/zpfh_1/202409/t20240906_11486229.htm.

⁸ *Sicomines, “Sicomines S.A. 2024,”* 2024, <https://x.com/SICOMINES/status/1751185378545979541?s=20>.

tahun 2021-2024 saat telah beralih pada masa pemerintahan presiden Felix Tshisekedi, presiden Felix menegosiasikan ulang perjanjian *Sicomines* dengan Tiongkok.⁹

Melihat keadaan Kongo yang terbatas, Tiongkok memperluas pengaruhnya. Pada 2021, Menteri Luar Negeri Wang Yi menawarkan penghapusan utang sebesar 28 juta dolar AS dan pendanaan infrastruktur jika Kongo bergabung dalam *Belt and Road Initiative*.¹⁰ Tiongkok terus memberikan investasi, pinjaman, dan bantuan kepada Kongo, dari awal mulai bekerjasama dan berlanjut hingga pasca pandemi. Meningkatnya pengaruh ini membuat Tiongkok semakin dominan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi Kongo khususnya di sektor pertambangan dan infrastruktur. Keunggulan Tiongkok dalam teknologi, efisiensi biaya, serta kemampuan teknis di bidang pertambangan menjadikannya aktor utama dalam pengelolaan sumber daya mineral Kongo.¹¹ Setelah satu dekade pasca perjanjian *Sicomines*, Kongo menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dari yang dijanjikan sehingga hal tersebut merugikan Kongo. Maka dari itu, kerja sama pengelolaan kobalt antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian keuntungan dan kontrol ekonomi, meskipun diklaim sebagai kemitraan yang saling menguntungkan.

⁹ South World, "DRC – China. The Honeymoon Is Over.," 2023, <https://www.southworld.net/drc-china-the-honeymoon-is-over/>.

¹⁰ Anna Agistia Pramesthi, "Relasi Patron-Client Pada Kerja Sama Antara Tiongkok Dan Rpublik Demokratik Kongo Tahun 2016-2021" 4, no. 1 (2023): 88–100.

¹¹ Anmita Intan Fatimah, Arhama Nurikhtiar, and Nurul Annisa, "Permasalahan Ham Dalam Percepatan Teknologi Lingkungan Di Kongo," *Jurnal Pena Wimaya* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31315/jpw.v3i1.8381>.

Kerjasama yang timpang antara Kongo dan Tiongkok dalam perjanjian Sicomenes menimbulkan pertanyaan mengapa situasi ini dapat terjadi. Skripsi ini menganalisis penyebab ketimpangan kerjasama Kongo dan Tiongkok dengan menggunakan teori dependensia dan mengambil judul "**Ketimpangan Relasi Kongo-Tiongkok dalam Investasi Infrastruktur melalui Hak Kelola Mineral Kobalt.**" Argumen dalam skripsi ini adalah bahwa ketergantungan Kongo kepada Tiongkok tidak semata-mata karena ketimpangan kapasitas, namun karena desain kerjasama yang membuka dominasi Tiongkok sehingga Kongo tidak akan mampu bersaing yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Mengapa terjadi ketimpangan pada relasi Kongo-Tiongkok dalam investasi infrastruktur melalui hak kelola mineral kobalt?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketimpangan Relasi Kongo-Tiongkok Dalam Investasi Infrastruktur Melalui Hak Kelola Mineral Kobalt.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi serta rujukan bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa

Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan masyarakat umum dan menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain yang fokus pada kajian ketimpangan relasi antarnegara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi penulis mengenai ketimpangan dalam kerja sama investasi antara Kongo dan Tiongkok. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan mitra kerja sama, khususnya terkait proyek pembangunan infrastruktur dan sektor pertambangan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan satu negara terhadap negara lain. Penelitian-penelitian tersebut akan memberikan dasar yang kuat dan perspektif yang lebih mendalam untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Beberapa penelitian tersebut mengenai kerjasama Tiongkok dengan Afrika khususnya Republik Demokratik Kongo.

Penelitian pertama dari sebuah jurnal skripsi tentang “**Analisis Penguasaan Tambang Kobalt di Republik Demokratik Kongo oleh Cina**” yang ditulis oleh Nicholas Rahangiar (2023) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan Jakarta menggunakan metode kualitatif. Jurnal ini berfokus pada kemampuan Cina dalam menguasai pertambangan kobalt di Kongo dan menguraikan kepentingan Cina melalui penguasaan tambang kobalt di sana. Cina sebagai negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat memiliki kekuatan

untuk berdiplomasi dengan negara lain melalui investasi dan pinjaman luar negeri. Negara di benua Afrika banyak yang melakukan kerjasama dengan Cina, salah satunya adalah Kongo. Negara Kongo yang mempunyai banyak sekali sumber daya alam dimanfaatkan oleh Cina, penguasaan sumber daya alam Kongo oleh negara lain bukanlah hal baru, karena sudah sering dimanfaatkan oleh negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka.¹²

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dominasi Tiongkok dalam kerja sama sektor pertambangan dengan Kongo, sehingga memperkaya data dan pemahaman terkait relasi kedua negara. Namun, berbeda dari penelitian tersebut yang lebih menekankan pada kepentingan Tiongkok, penelitian penulis berfokus pada ketimpangan investasi infrastruktur berbasis kobalt yang disepakati melalui perjanjian antara Kongo dan Tiongkok.

Penelitian kedua dari sebuah jurnal penelitian tentang **“Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama Pertambangan Kongo dan Tiongkok”** yang diteliti oleh Denta Utama, Muhammad Rosyidin, dan Fendy Eko Wahyudi (2022) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menggunakan metode kualitatif. Penelitian terdahulu kali ini agak berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada kepentingan Tiongkok dalam menguasai pertambangan kobalt di Kongo. Sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada kerjasama Tiongkok dan Kongo melalui perusahaan transnasional Huayou Cobalt. Penelitian

¹² Nicholas Rahangiar, “Analisis Penguasaan Tambang Kobalt Di Republik Demokratik Kongo Oleh Cina,” 2023, 1–9.

ini difokuskan pada Perusahaan Tiongkok Huayou Cobalt yang berada di Kongo ini menunjukkan bahwa Tiongkok berhasil mendapatkan hak eksplorasi mineral di Kongo melalui investasi dan pinjaman luar negeri yang di berikanya.¹³

Penelitian ini menambah pemahaman mengenai kerja sama pertambangan berbasis investasi, khususnya terkait hak eksplorasi mineral kobalt, sehingga menjadi rujukan data bagi penulis dalam melihat pola kerja sama tersebut. Namun, penelitian terdahulu ini lebih menyoroti peran perusahaan transnasional Tiongkok dalam pengelolaan kobalt di Kongo.

Penelitian ketiga dari jurnal penelitian yang berjudul **“Analisis Marxisme Dalam Hubungan Internasional Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam: Kasus Pertambangan Kobalt di Kongo”** yang ditulis oleh Fathan Lutfiandi, Shalsabila Aurelia, dan Irwansyah (2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kali ini membahas mengenai penggalian relevansi Marxisme dalam hubungan internasional dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Kongo dapat tersaji dari aspek ekonomi. Kobalt merupakan komoditas pertambangan di Kongo dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing untuk beroperasi memanfaatkan nilai komoditas tersebut. Hal tersebut menjadi justifikasi pemahaman dasar dari Marxisme bahwa

¹³ Utama, Rosyidin, and Wahyudi, “*Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt Dalam Kerjasama Pertambangan Kongo Dan Tiongkok Denta.*”

adanya ketidakmampuan Kongo dalam memanfaatkan potensi sumber dayanya sendiri.¹⁴

Penelitian ini memberikan pandangan terhadap eksploitasi sumber daya kobalt di Kongo, fokus utamanya berada pada aspek ekonomi, terutama tingginya nilai jual komoditas kobalt yang mendorong pemanfaatan sumber daya tersebut. Sehingga memberikan penguatan dalam penelitian penulis mengenai kelemahan posisi Kongo dalam memperjuangkan kepentingannya dalam perjanjian kerja sama dengan Tiongkok.

Penelitian keempat diambil dari jurnal penelitian mengenai **“Tiongkok dan Afrika: Ketergantungan dan Ancaman dalam Belt and Road Initiative”** yang ditulis oleh Bima Putra Nur Firdaus (2023) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai Kebijakan BRI oleh Tiongkok telah menciptakan struktur ketergantungan di mana negara-negara Afrika semakin bergantung pada Tiongkok dalam hal pembangunan ekonomi dan investasi. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan keuangan yang kuat terhadap Tiongkok. Sebagai negara *core*, Tiongkok memberikan "bantuan" keuangan untuk memajukan Afrika, namun bantuan ini tidaklah tanpa motif terselubung. Investasi yang diberikan oleh Tiongkok memungkinkan eksploitasi sumber daya di Afrika. Dengan membuat Afrika terjebak dalam utang kepada Tiongkok, Tiongkok dapat memperoleh sumber daya Afrika dengan harga yang murah, sekaligus memperoleh pengaruh politik di

¹⁴ Fathan Lutfiandi, Shalsabila Aurelia, and Irwansyah, “*Analisis Marxisme Dalam Hubungan Internasional Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam: Kasus Pertambangan Kobalt Di Kongo*,” no. september 2016 (2016): 1–6.

benua tersebut. Penelitian ini membahas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Tiongkok berkedok investasi di negara benua Afrika yaitu negara Kongo melalui kebijakan BRI yang berujung pada ketergantungan negara benua Afrika.¹⁵ Ini memberikan penguatan terhadap penelitian penulis tentang pola dominasi melalui investasi Tiongkok di benua Afrika.

Penelitian kelima diambil dari jurnal penelitian berjudul ***“Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital Cina Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika”*** yang ditulis oleh Faris Al-Fadhat dan Hari Prasetyo (2022) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan Cina meluaskan kerjasama ekonominya secara internasional dalam bentuk investasi dan utang secara bilateral maupun multilateral. Investasi dan utang ini tersebar di seluruh dunia, mencakup wilayah Amerika Utara, Eropa, Asia, Oseania, Amerika Latin, Karibia, dan Afrika. Kedatangan Tiongkok di Afrika, di sisi lain, telah menciptakan jebakan utang bagi beberapa negara seperti Zimbabwe, Kamerun, dan Djibouti. Pengaruh dominan Cina dalam sektor keuangan dan proyek strategis sangat signifikan, sehingga menciptakan kondisi di mana negara-negara tersebut mengalami kesulitan dalam membayar utang dalam jangka panjang. Cina menjadikan kerjasama ekonomi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengaruh ekonominya di negara lain, termasuk dalam upaya mencapai status sebagai negara adidaya, dengan memanfaatkan kondisi di negara-negara Afrika. Penelitian kelima memberikan

¹⁵ Bima Putra Nur Firdaus, “*Tiongkok Dan Afrika: Ketergantungan Dan Ancaman Dalam Belt and Road Initiative*,” *Research Gate*, no. 6 (2023), <https://www.researchgate.net/publication/371702279%0ATiongkok>.

paparan, Tiongkok sebagai negara *superpower* yang membentuk jalinan kerjasama dengan negara di Afrika melalui investasi dan pinjaman utang dengan memanfaatkan kondisi kelemahan negara Kongo.¹⁶ Maka, penulis dapat memperoleh penegasan mengenai investasi dan pinjaman hutang dalam kerjasama Tiongkok dengan negara-negara Afrika.

Penelitian keenam diambil dari jurnal skripsi berjudul “**Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Kobalt Tiongkok Terhadap Dimensi Keamanan Manusia di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2024**” yang ditulis oleh Syabina Kheisa Briliana (2025) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan aktivitas pertambangan kobalt yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok di Republik Demokratik Kongo memengaruhi berbagai aspek keamanan manusia di sana. Fokusnya dari 2018 sampai 2024, dengan perhatian khusus pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul dari eksplorasi dan produksi kobalt sebagai bahan penting untuk baterai lithium ion. Melihat bahwa Kobalt di Republik Demokratik Kongo adalah sumber penting bagi industri teknologi hijau global, khususnya kendaraan listrik. Tiongkok memiliki kontrol besar atas produksi kobalt di RDK dan dunia. Dominasi Tiongkok membuat RDK terkena dampak positif maupun negatif, seperti aspek- aspek dasar keamanan manusia yang harusnya

¹⁶ Faris Al-Fadhat and Hari Prasetyo, “*Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital China Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika*,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 18, no. 2 (2022): 150–76, <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.5262.150-176>.

didapat justru kian terancam dan mengalami degradasi lingkungan secara signifikan.¹⁷

Penelitian terdahulu ini menunjukkan adanya dominasi Tiongkok dalam sektor pertambangan di Kongo, dengan penekanan pada dampaknya terhadap keamanan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Temuan tersebut memperkuat argumen penulis bahwa dominasi Tiongkok dalam pertambangan Kongo tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi negatif bagi kondisi domestik Kongo.

Penelitian ketujuh diambil dari jurnal penelitian berjudul **“Dampak Negatif Kerjasama BRI Kenya-China dari Perspektif Teori Dependensi”** ditulis oleh Ratri Sinta Wulandari (2024) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian penulis yaitu teori ketergantungan Theotonio Dos Santos. Penelitian ini memaparkan Kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) antara Kenya dan China melalui pembangunan *Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway* (SGR) membawa dampak positif sekaligus negatif bagi Kenya. Penelitian ini menyoroti dampak negatif yang signifikan terhadap Kenya. Kenya terjerat utang besar pada China, hingga menyumbang lebih dari separuh total utang bilateral luar negerinya, sehingga memunculkan isu jebakan utang dan risiko kehilangan aset strategis seperti Pelabuhan Mombasa. Selain itu, proyek ini juga memunculkan masalah sosial berupa eksploitasi tenaga kerja lokal yang dibayar rendah dan

¹⁷ Syabina Kheisa Briliana, “Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Kobalt Tiongkok Terhadap Dimensi Keamanan Manusia Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2024” 4, no. 02 (2025): 7823–30.

diperlakukan tidak adil, sementara pekerja China mendapat perlakuan istimewa. Dari sisi lingkungan, jalur kereta yang melewati Taman Nasional Nairobi merusak ekosistem, mengganggu pariwisata, dan menimbulkan konflik agraria akibat penggusuran lahan. Lebih jauh, ketergantungan ekonomi ini membuat Kenya semakin sulit mengambil kebijakan independen, karena posisi tawar politiknya semakin lemah di hadapan China.¹⁸

Penelitian terdahulu ini menggunakan teori dependensi Dos Santos untuk menjelaskan relasi asimetris antara negara pusat (core) dan negara pinggiran (periphery). Pendekatan tersebut memperkuat argumen penulis bahwa ketimpangan hubungan semacam ini cenderung menempatkan negara pinggiran dalam posisi yang dirugikan, sementara keuntungan lebih banyak mengalir ke negara pusat.

Penelitian kedelapan diambil dari jurnal skripsi berjudul **“Relasi Patron-Client Pada Kerja Sama Antara Tiongkok Dan Republik Demokratik Kongo Tahun 2016-2021”** ditulis oleh Anna Agistia Pramesthi (2022) Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan asimetris Tiongkok dan Republik demokratik Kongo dengan menggunakan teori patron-klien, yang mana kelemahan yang dimiliki oleh klien yaitu Republik Demoktatik Kongo ditopang dengan sebaik-baiknya oleh pihak patron yaitu Tiongkok. Dengan menganalisis menggunakan teori patron-client penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan Tiongkok-Kongo bersifat patronase, di mana Tiongkok mendapatkan akses luas

¹⁸ Ratri Sinta Wulandari, *“Dampak Negatif Kerjasama Ekonomi Belt And Road Initiative Kenya-China Di Tinjau Dari Teori Dependensi,”* 2024, 167–86.

atas sumber daya mineral strategis, sedangkan Kongo menerima pembangunan infrastruktur namun tetap menanggung risiko besar berupa ketergantungan, eksploitasi, dan berkurangnya kedaulatan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan tersebut menguntungkan tetapi tidak seimbang, dan Kongo perlu meningkatkan kapasitas negara agar tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan.¹⁹

Penelitian ini mengkaji hubungan asimetris antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok melalui pendekatan teori patron-klien. Perspektif tersebut memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam memahami dan menjelaskan pola ketimpangan relasi kedua negara meski dari sudut pandang yang berbeda.

Penelitian kesembilan diambil dari jurnal penelitian berjudul **“Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorsium Perusahaan China Dan Pemerintah Kongo”** ditulis oleh Witri Elvianti dan Dibyana Galih Prakasita (2021) Fakultas Humaniora Universitas Presiden menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dampak kerja sama eksplorasi mineral antara Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo (RDK) terhadap kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tambang. Penelitian ini menunjukkan bahwa model kerja sama yang sangat menekankan kepentingan ekonomi telah mendorong terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Kemitraan ekonomi Tiongkok-Kongo belum sepenuhnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan justru memperkuat pola ketergantungan serta membuka ruang terjadinya pelanggaran

¹⁹ Pramesthi, “*Relasi Patron-Client Pada Kerja Sama Antara Tiongkok Dan Rpublik Demokratik Kongo Tahun 2016-2021*,” 4, no. 1 (2023), 88-100.

HAM di sektor pertambangan. Kerja sama yang seharusnya membawa pembangunan justru memunculkan pola hubungan yang eksploitatif dan tidak adil.²⁰

Penelitian ini membahas kerja sama ekonomi antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok yang memunculkan ketergantungan, dengan penekanan pada isu pelanggaran HAM. Temuan tersebut memperkuat argumen penulis bahwa kerja sama pertambangan kedua negara tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga cenderung merugikan Kongo.

Penelitian kesepuluh diambil dari jurnal penelitian berjudul **“Keamanan Manusia Dan Ekologi Politik Dalam Pertambangan Kobalt Di Republik Demokratik Kongo”** ditulis oleh Hikmatul Karimah, Muhammad Rafly Farezki Fadza, Naswa Syifa Indana, dan Dhimas Rudy Hartanto (2025) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas keterkaitan antara keamanan manusia, ekologi politik, dan aktivitas pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo (RDK). Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun kobalt menjadi sumber pendapatan penting bagi negara, praktik pertambangan di RDK masih dipenuhi masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia, kerja anak, ketidakamanan kerja, dan eksploitasi ekonomi oleh perusahaan asing. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menunjukkan bahwa

²⁰ Witri Elviati and Dibyana Galih Prakasita, “Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksploitasi Mineral Dan Pemerintah Kongo (*Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo*),” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 325–48.

pembangunan ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan dampak ekologis yang muncul.²¹

Penelitian ini mengkaji pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo dengan menyoroti aspek keamanan manusia dan ekologi politik di wilayah tambang. Kajian tersebut memperkuat argumen penulis bahwa aktivitas pertambangan kobalt di Kongo menimbulkan berbagai persoalan serta dampak serius yang merugikan negara tersebut.

Penelitian kesebelas diambil dari artikel jurnal yang berjudul “*The Democratic Republic Of The Congo-China’s Deals On Construction Of Roads In Exchange Of Mines*” ditulis oleh Philippe Tunamsifu Shirambere (2020) Fakultas Hukum Universitas Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma) menggunakan metode pendekatan historis dan komparatif. Penelitian ini membahas kondisi RDK pasca-rezim Mobutu dan konflik bersenjata berkepanjangan, di mana negara mengalami kerusakan infrastruktur parah dan kekurangan dana pembangunan. Ketika negara-negara Barat gagal menyalurkan bantuan yang sebelumnya dijanjikan karena berbagai syarat tata kelola dan hak asasi manusia, pemerintahan Joseph Kabila beralih ke Tiongkok yang menawarkan pendanaan besar tanpa prasyarat politik. Penelitian ini menyoroti perjanjian *Sicomines* sebagai contoh utama kerja sama “*resources for infrastructure*”, di mana konsorsium perusahaan Tiongkok membiayai pembangunan jalan dan infrastruktur lain sebagai imbalan atas konsesi tambang. Kesepakatan tersebut memperkuat ketergantungan

²¹ Hikmatul Karimah et al., “Keamanan Manusia Dan Ekologi Politik Dalam Pertambangan Kobalt Di Republik Demokratik Kongo” 9, no. 2 (2025): 305–24, <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.685>.

ekonomi RDK terhadap Tiongkok dan membatasi ruang negara untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri.²²

Penelitian ini menyoroti ketergantungan antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok dalam konteks perjanjian Sicomines, dengan menelusuri sejarah hubungan kedua negara yang membentuk pola ketergantungan tersebut. Kajian ini memberikan tambahan pemahaman mengenai bagaimana dinamika relasi bilateral, khususnya melalui Sicomines, pada akhirnya memperkuat posisi ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok.

Penelitian kedua belas diambil dari artikel Tesis berjudul “*China’s investment in the Democratic Republic of Congo: The impact of the 2007 Sino-Congolese agreement in a postwar period*” ditulis oleh John Bintu Bantu Kafarhire (2019) Fakultas Seni Liberal dan Ilmu Sosial Universitas *Depaul* Chicago Illinois menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini membahas bahwa meskipun investasi Tiongkok di sektor pertambangan dan infrastruktur telah meningkatkan aktivitas ekonomi dan mempercepat eksploitasi sumber daya mineral, manfaat yang diterima RDK masih sangat terbatas. Skema kerja sama yang mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan konsesi pertambangan cenderung lebih menguntungkan pihak Tiongkok, baik dari sisi kontrol produksi, keuntungan ekonomi, maupun penguasaan rantai nilai. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya kapasitas institusional RDK, tingginya tingkat korupsi, serta kurangnya transparansi dalam kontrak sebagai faktor utama yang memperparah

²² Philippe Tunamsifu Shirambere, “*The Democratic Republic Of The Congo-China ’S Deals On Construction Of Roads In Exchange Of Mines*” 33, no. 2 (2020): 79–94.

ketergantungan relasi kedua negara. Akibatnya, alih-alih mendorong pembangunan berkelanjutan, investasi Tiongkok justru berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi DRC terhadap pihak asing dan memperkuat pola hubungan yang tidak seimbang.²³

Penelitian ini mengkaji ketergantungan Republik Demokratik Kongo terhadap investasi Tiongkok yang dinilai membawa dampak negatif bagi Kongo. Temuan tersebut memberikan penguatan bagi argumen penulis bahwa kerja sama dengan skema infrastruktur untuk pertambangan cenderung lebih menguntungkan pihak Tiongkok dibandingkan Kongo.

Penelitian ketiga belas diambil dari artikel jurnal berjudul “*The Sicomines Agreement: Strategic Partnership or Unequal Exchange between China and Democratic Republic of Congo?*” ditulis oleh Panagiotis Skaltsounis (2025) Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas *Peloponnese* menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan melalui Sicomines, perusahaan-perusahaan Tiongkok berhasil mengamankan akses jangka panjang terhadap cadangan tembaga dan kobalt strategis di DRC, sementara realisasi pembangunan infrastruktur berjalan lambat, tidak transparan, dan jauh dari janji awal. Dominasi Tiongkok dalam pengambilan keputusan operasional, pembebasan pajak, serta minimnya regulasi lingkungan dan sosial, termasuk isu pencemaran dan pekerja anak, memperlihatkan ketimpangan struktural dalam hubungan kedua negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sicomines belum dapat dikategorikan

²³ John Bintu Bantu Kafarhire, “*China’s Investment in the Democratic Republic of Congo: The Impact of the 2007 Sino-Congolese Agreement in a Postwar Period*,” 2019.

sebagai kerja sama “*win-win*”, melainkan cerminan hubungan asimetris yang memperdalam ketergantungan ekonomi DRC terhadap Tiongkok, meskipun tetap diakui bahwa investasi Tiongkok muncul di tengah keterbatasan pilihan DRC pascakonflik.²⁴

Penelitian ini memberikan pandangan bahwa perjanjian *Sicomines* memberikan dampak buruk terhadap Kongo dan memperkuat *statement* penulis bahwa relasi ini bersifat asimetris sehingga membuat Kongo dalam posisi yang semakin dirugikan.

Penelitian keempat belas dari artikel jurnal berjudul “***China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation***” ditulis oleh Claude Kabemba Universitas Florida menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama tersebut menghasilkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekspor mineral, relasi yang terbangun bersifat asimetris karena lemahnya kapasitas negara RDK, tingginya korupsi, serta minimnya transparansi dalam perjanjian. Tiongkok, dengan kekuatan ekonomi dan finansialnya, memperoleh keuntungan strategis berupa akses jangka panjang terhadap sumber daya mineral, sementara manfaat bagi masyarakat Kongo cenderung terbatas dan tidak berkelanjutan. Kabemba menegaskan bahwa pendekatan non-intervensi Tiongkok justru memperkuat dominasi elit lokal dan melanggengkan pola ekstraktivisme, sehingga kerja sama

²⁴ Panagiotis Skaltsounis, “*The Sicomines Agreement : Strategic Partnership or Unequal Exchange between China and Democratic Republic of Congo ?*” 23, no. 2 (2025).

ini gagal mendorong transformasi struktural, transfer teknologi, maupun penguatan institusi negara di RDK.²⁵

Penelitian ini mengkaji keterbatasan Republik Demokratik Kongo dalam perjanjian Sicomines yang membentuk relasi asimetris dengan Tiongkok, sehingga keuntungan lebih banyak mengalir ke pihak Tiongkok. Kajian tersebut memberikan tambahan data mengenai faktor-faktor kelemahan Kongo yang mendorong terjadinya ketergantungan dalam kerja sama *Sicomines*.

Penelitian kelima belas dari jurnal berjudul “*The Sicomines agreement revisited: prudent Chinese banks and risk-taking*” oleh Johanna Jansson (2013) Universitas Roskilde Denmark menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas secara mendalam perjanjian *Sicomines*, yakni skema kerja sama “mineral untuk infrastruktur” antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dan konsorsium perusahaan Tiongkok yang disepakati pada 2007-2009. Dalam perjanjian ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok menguasai 68% saham, sementara pihak Kongo hanya 32%, mencerminkan ketimpangan posisi tawar sejak awal. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana perjanjian tersebut lahir dari kebutuhan politik Presiden Joseph Kabila akan pendanaan cepat untuk program pembangunan pascaperang, di tengah keterbatasan akses terhadap dana IMF dan donor Barat. Adanya perbedaan sikap aktor Tiongkok: bank-bank Tiongkok cenderung berhati-hati dan fokus pada keberlanjutan utang, sementara perusahaan-perusahaan

²⁵ Claude Kabemba, “China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation,” *African Studies Quarterly* 16, no. 3–4 (2016): 73–88.

Tiongkok justru bersedia mengambil risiko besar demi menjaga akses tambang dan hubungan politik dengan rezim Kabila.²⁶

Penelitian tersebut menguraikan perjanjian *Sicomines* secara rinci sejak proses negosiasi pada 2007-2009 hingga hasil akhir kesepakatan. Fokus kajiannya menekankan bahwa *Sicomines* lahir dari kepentingan politik Presiden Kabila dan menghadapi berbagai kendala pembiayaan yang menyebabkan proyek infrastruktur tertunda, sehingga memperkuat argumen penulis bahwa perjanjian ini menyimpan polemik yang membuat Kongo sulit berada pada posisi setara dalam kerja sama dengan Tiongkok.

Melalui narasi penelitian terdahulu, maka penulis pemahaman terhadap penelitian terdahulu tersebut. Berikut adalah pemahaman yang diperoleh, penulis menempatkan kontribusi penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Topik/Judul Penelitian, Nama, Volume, Tahun	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Skripsi: Analisis penguasaan tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo oleh Cina Oleh: Nicholas Rahangiar	Metode Kualitatif	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dominasi ekonomi Tiongkok dalam penguasaan pertambangan kobalt di Kongo melalui skema investasi dan pinjaman. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memperkaya literatur tentang pola dominasi ekonomi Tiongkok dalam hubungan Tiongkok-Kongo, khususnya di sektor pertambangan.
2.	Jurnal: Di Balik Keterbelakangan	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian <i>Sicomines</i> menciptakan

²⁶ Johanna Jansson, "The *Sicomines* Agreement Revisited : Prudent Chinese Banks and Risk- Taking Chinese Companies" 40, no. 135 (2013): 152–62.

	Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama Pertambangan Kongo dan Tiongkok Oleh: Denta Utama, Muhammad Rosyidin, dan Fandi Eko Wahyudi		posisi yang tidak seimbang bagi Kongo akibat beban pinjaman, ketentuan kontrak yang menguntungkan Tiongkok, serta lemahnya kapasitas domestik. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memberikan bukti empiris bahwa kerja sama <i>Sicomines</i> cenderung memperkuat dominasi Tiongkok dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi Kongo.
3.	Jurnal: Analisis Marxisme Dalam Hubungan Internasional Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam: Kasus Pertambangan Kobalt di Kongo Oleh: Fathan Lutfiandi, Shalsabila Aurelia, dan Irwansyah	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi kobalt di Kongo lebih banyak menguntungkan perusahaan multinasional dan negara asing, terutama Tiongkok, sehingga mencerminkan ketimpangan dalam sistem ekonomi global. Yang akan memperkuat argumen bahwa pengelolaan kobalt di Kongo merefleksikan pola ketergantungan dan subordinasi negara berkembang terhadap kekuatan ekonomi yang lebih dominan.
4.	Jurnal: Tiongkok dan Afrika: Ketergantungan dan Ancaman dalam Belt and Road Initiative Oleh: Bima Putra Nur Firdaus	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara Afrika terhadap Tiongkok melalui investasi dan pinjaman yang membuka ruang eksploitasi sumber daya alam. Ini memberikan dasar analisis mengenai bagaimana investasi Tiongkok dapat membentuk pola ketergantungan dan memperkuat posisi dominannya di Afrika.
5.	Jurnal: <i>Debt-Trap Diplomacy</i>: Bagaimana Ekspansi Kapital Cina Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan pola investasi berbasis utang yang digunakan Tiongkok dalam memperluas pengaruh ekonominya di Afrika, yang dalam beberapa kasus berujung pada

	Oleh: Faris Al-Fadhat dan Hari Prasetyo		meningkatnya ketergantungan dan pengaruh atas sektor strategis negara penerima. Penelitian ini memberikan gambaran pola umum dominasi ekonomi Tiongkok yang dapat menjadi pembandingan dalam menganalisis kasus Kongo.
6.	Skripsi: Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Kobalt Tiongkok Terhadap Dimensi Keamanan Manusia di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2024 Oleh: Syabina Kheisa Briliana	Metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan besarnya kontrol Tiongkok atas produksi kobalt di RDK serta dampaknya terhadap eksploitasi sumber daya, ancaman keamanan manusia, dan degradasi lingkungan. Yang mana memberikan pemahaman mengenai dampak dominasi Tiongkok dalam pertambangan kobalt sebagai bentuk ketimpangan relasi ekonomi.
7.	Jurnal: Dampak Negatif Kerjasama BRI Kenya-China dari Perspektif Teori Dependensi Oleh: Ratri Sinta Wulandari	Metode kualitatif	Kerjasama China-Kenya dalam kerangka Belt and Road Initiative mencerminkan relasi asimetris menurut teori dependensi Dos Santos, dengan dampak negatif seperti jebakan utang dan eksploitasi yang lebih merugikan Kenya. Ini akan memberikan pembandingan empiris bahwa pola dominasi ekonomi Tiongkok juga terjadi di negara lain yang dianalisis menggunakan teori yang sama, sehingga memperkuat analisis kasus Republik Demokratik Kongo.
8.	Skripsi: Relasi Patron-Client Pada Kerja Sama Antara Tiongkok Dan Republik Demokratik Kongo Tahun 2016-2021 Oleh: Anna Agistia Pramesthi	Metode Kualitatif	Menjelaskan relasi Tiongkok-RDK melalui perspektif patron-klien, dengan menyoroti kesenjangan ekonomi dan posisi kepatuhan Kongo akibat kebutuhannya terhadap Tiongkok. <i>Research</i> ini memperkaya pemahaman mengenai pola hubungan dan persepsi kepentingan kedua negara dalam kerjasama yang bersifat asimetris.

9.	Jurnal: Pelanggaran HAM Dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorsium Perusahaan China Dan Pemerintah Kongo Oleh: Witri Elvianti dan Dibyana Galih Prakasita	Metode Kualitatif	Kerja sama China-Kongo berlangsung secara tidak seimbang dan lebih menguntungkan China, termasuk melalui perlindungan khusus bagi pekerja migrannya. Yang akan memberikan wawasan bahwa ketimpangan ekonomi dalam kerja sama tersebut berdampak buruk dan merugikan Kongo.
10.	Jurnal: Keamanan Manusia Dan Ekologi Politik Dalam Pertambangan Kobalt Di Republik Demokratik Kongo Oleh: Hikmatul Karimah, Muhammad Rafly Farezki Fadza, Naswa Syifa Indana, dan Dhimas Rudy Hartanto	Metode Kualitatif	Eksplorasi kobalt dalam kerangka transisi energi global menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan di Republik Demokratik Kongo. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memperkuat argumen bahwa negara berkembang yang kaya mineral sering kali menanggung dampak negatif akibat dominasi dan kepentingan aktor asing.
11.	Jurnal: <i>The Democratic Republic Of The Congo- China's Deals On Construction Of Roads In Exchange Of Mines</i> Oleh: Philippe Tunamsifu Shirambere	Metode pendekatan historis dan komparatif	Menjelaskan latar belakang historis kebutuhan pendanaan Kongo pascaperang serta bagaimana perjanjian <i>Sicomines</i> dengan Tiongkok melahirkan pola ketergantungan baru. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memberikan konteks historis dan politik yang memperjelas terbentuknya relasi ketergantungan dalam kerja sama Kongo-Tiongkok.
12.	Tesis: <i>China's investment in the Democratic Republic of Congo: The impact of the 2007 Sino-Congolese agreement in a postwar period</i> Oleh: John Bintu Bantu Kafarhire	Metode kualitatif dan kuantitatif	Investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo, khususnya melalui perjanjian <i>Sicomines</i>, lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi Kongo. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memberikan rujukan empiris bahwa investasi tersebut memperkuat ketimpangan dan tidak

			sepenuhnya menguntungkan pihak Kongo.
13.	Jurnal: <i>The Sicomines Agreement: Strategic Partnership or Unequal Exchange between China and Democratic Republic of Congo?</i> Oleh: Panagiotis Skaltsounis	Metode kualitatif	Investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo, khususnya melalui perjanjian <i>Sicomines</i> , lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi Kongo. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memberikan rujukan empiris bahwa investasi tersebut memperkuat ketimpangan dan tidak sepenuhnya menguntungkan pihak Kongo.
14.	Jurnal: <i>China-Democratic Republic of Congo Relations: From a Beneficial to a Developmental Cooperation</i> Oleh: Claude Kabemba	Metode kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa skema <i>resource for infrastructure</i> antara RDK dan Tiongkok yang diklaim saling menguntungkan pada praktiknya membentuk relasi asimetris akibat keterbatasan Kongo. Kontribusinya bagi penelitian penulis adalah memberikan pemahaman mengenai pola ketimpangan dan faktor-faktor yang membuat Tiongkok lebih dominan dalam perjanjian tersebut.
15	Jurnal: <i>The Sicomines agreement revisited: prudent Chinese banks and risk-taking</i> Oleh: Johanna Jansson	Metode kualitatif	Implementasi <i>Sicomines</i> mengalami keterlambatan akibat persoalan pembiayaan, sekaligus menyoroti dominasi Tiongkok dalam skema pendanaannya. Kontribusinya untuk penulis adalah memberikan rujukan empiris mengenai dinamika pelaksanaan <i>Sicomines</i> 2007-2009 dan ketimpangan dalam pengelolaan pembiayaan proyek infrastruktur.

1.5. Kerangka Teori

Penelitian yang berkualitas memerlukan landasan konseptual dan penerapan teori yang kuat, karena keduanya berperan penting dalam membangun kerangka berpikir serta menentukan arah dan hasil penelitian. Oleh sebab itu, penggunaan

teori dan konsep menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam studi ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Pada abad ke-18, revolusi industri yang besar telah memberikan dampak signifikan terhadap peradaban dunia, yang kemudian melahirkan perspektif neo-marxisme. Perspektif neo-marxisme berasal dari perpanjangan asumsi perspektif marxisme. Penjelasan mengenai perspektif neo-marxisme dibagi menjadi empat, *World System Theory* (WTS), Gramscianisme yang dibawa oleh Gramsci, Teori Dependensi, dan *Empire* yang merupakan salah satu perkembangan neomarxisme oleh Michael Hardt. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori ketergantungan (*dependency*) yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos untuk menjelaskan bagaimana Republik Demokratik Kongo membuat kebijakan investasi infrastruktur dibawah kuasa Tiongkok.

Teori ketergantungan menjelaskan bahwa pembangunan di negara berkembang kerap tidak berjalan ideal karena adanya ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial terhadap negara maju. Masuknya pengaruh negara pusat melalui ekonomi, budaya, dan investasi menciptakan ketimpangan struktural yang mendalam. Negara berkembang menjadi terfokus pada perdagangan ekspor, sementara kebutuhan domestik terabaikan, menimbulkan *enclave economy* dimana terdapat keadaan yang maju di dalam negeri yang masih tertinggal sehingga tidak memberikan kesejahteraan luas kepada Masyarakat lokal. Ketimpangan ini diperparah oleh investasi asing yang dalam jangka pendek mendorong

pertumbuhan, tetapi dalam jangka panjang menyebabkan ketergantungan akibat keuntungan kembali ke negara asal investor dan beban utang.²⁷

Struktur ekonomi negara pinggiran menjadi timpang, di mana sektor ekspor berkembang pesat sementara sektor lain stagnan, menciptakan kesenjangan pendapatan dan penurunan ekonomi. Ketimpangan tersebut berdampak pada ranah politik dan sosial, memperkuat dominasi elit serta memunculkan pemerintahan represif yang menekan buruh dan masyarakat bawah. Akibat distribusi pendapatan yang tidak merata, konflik sosial pun mudah muncul karena kelompok masyarakat saling berebut keuntungan ekonomi yang tidak dibagi secara adil, terutama saat kondisi ekonomi memburuk.²⁸

Teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos menjelaskan bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem ekonomi global bersifat tidak seimbang. Negara-negara berkembang sering berada pada posisi yang bergantung terhadap negara yang lebih maju, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun investasi. Dalam perspektif ini, keterbelakangan suatu negara bukan dipandang sebagai tahap awal menuju pembangunan, melainkan sebagai hasil dari hubungan struktural dalam sistem kapitalisme global yang menempatkan negara-negara pinggiran sebagai pemasok bahan mentah bagi negara pusat. Kondisi tersebut menyebabkan negara berkembang sulit mencapai kemandirian ekonomi karena struktur perdagangan,

²⁷ Mohtar Mas'ood, *"Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi," Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 1990, hlm. 243.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 246.

investasi, dan teknologi yang dikuasai oleh negara maju cenderung mempertahankan pola ketergantungan tersebut.²⁹

Menurut Theotonio Dos Santos, ketergantungan terjadi ketika perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh perkembangan ekonomi negara lain. Dalam hubungan ekonomi global, negara-negara memang saling terhubung, namun hubungan tersebut menjadi timpang ketika hanya sebagian negara yang mampu tumbuh dan mandiri secara ekonomi, sementara negara lainnya hanya dapat berkembang sejauh mengikuti atau bergantung pada ekspansi ekonomi negara yang lebih dominan.³⁰ Dalam situasi ini, kemajuan negara yang bergantung tidak berdiri atas kekuatan internalnya sendiri, melainkan sebagai dampak dari perkembangan negara dominan, yang pada akhirnya dapat membawa konsekuensi positif maupun negatif bagi pembangunan ekonomi negara tersebut.

Kemakmuran ekonomi suatu negara dapat menyebabkan masalah keterbelakangan di negara lain. Dengan demikian, negara-negara di seluruh dunia dibagi menjadi dua kelompok: *core* dan *periphery*. Dos Santos, seorang penganut teori ketergantungan, mengatakan bahwa negara-negara pinggiran (*periphery*) hanyalah bayangan dari negara-negara pusat (*core*).³¹ Teori ketergantungan menjelaskan dalam proses integrasi ekonomi nasional ke dalam pasar dunia, baik melalui perdagangan komoditas, aliran modal, maupun tenaga kerja, hubungan yang terbentuk pada dasarnya tidak berlangsung secara setara.

²⁹ Theotonio Dos Santos, *Teoria Da Dependencia Balanco e Perspectivas* (editora unsular, 2013).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Theotonio Dos Santos, "The Structure Of Dependence" 60, no. 1 (1970).

Ketidakseimbangan ini muncul karena perkembangan sebagian negara terjadi dengan mengorbankan negara lain. Dalam hubungan perdagangan, negara-negara pusat menguasai pasar melalui posisi monopoli, sehingga surplus ekonomi yang dihasilkan negara-negara pinggiran mengalir ke negara pusat. Sementara itu, dalam hubungan keuangan, negara pusat memperoleh keuntungan melalui pinjaman dan investasi modal, yang memungkinkan mereka menarik bunga dan laba sekaligus memperkuat kendali atas perekonomian negara lain.³²

Bagi negara-negara yang pinggiran, hubungan ini justru berarti keluarnya keuntungan dan bunga ke luar negeri, serta berkurangnya kendali atas sumber daya produktif nasional. Untuk mempertahankan hubungan yang merugikan tersebut, negara pinggiran dipaksa menghasilkan surplus besar bukan melalui peningkatan teknologi, melainkan melalui eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan. Akibatnya, perkembangan pasar domestik, kapasitas teknologi, serta kualitas sosial masyarakat menjadi terhambat. Kondisi inilah yang disebut sebagai pembangunan gabungan, yaitu suatu proses di mana ketimpangan tidak hanya terus berlangsung, tetapi juga menjadi bagian struktural dari sistem ekonomi global.

Menurut Dos Santos, bentuk pertama dari ketergantungan adalah ketergantungan kolonial. Ketergantungan kolonial merujuk pada pola hubungan ekonomi pada masa kolonial yang berfokus pada perdagangan ekspor sumber daya alam. Dalam sistem ini, modal dagang dan keuangan Eropa bekerja sama dengan negara penjajah untuk menguasai hubungan ekonomi antara Eropa dan wilayah koloni. Penguasaan tersebut dijalankan melalui monopoli perdagangan yang

³² *Ibid.*

diperkuat oleh monopoli atas tanah, pertambangan, dan tenaga kerja di wilayah jajahan, termasuk penggunaan tenaga kerja paksa atau perbudakan. Akibatnya, negara pinggiran berperan terutama sebagai pemasok bahan mentah, sementara kendali atas sumber daya dan hasil ekonomi berada di tangan kekuatan negara penjajah.³³

Hubungan semacam ini bersifat sangat eksploitatif karena keuntungan terbesar mengalir ke pihak penjajah, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Monopoli kolonial atas sumber daya alam dan tenaga kerja tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi domestik, tetapi juga menciptakan struktur ketergantungan yang terus berlanjut meskipun masa kolonial telah berakhir. Dengan demikian, ketergantungan kolonial menjadi fondasi awal ketimpangan struktural antara negara pusat dan negara pinggiran dalam sistem ekonomi global.

Bentuk kedua dari ketergantungan menurut Dos Santos adalah ketergantungan finansial-industrial, ketergantungan ini mulai menguat sejak akhir abad ke-19, ditandai dengan dominasi modal besar yang terkonsentrasi di negara-negara pusat kekuatan ekonomi dunia. Modal tersebut kemudian berkembang ke luar negeri melalui investasi pada sektor produksi bahan mentah dan hasil pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di negara-negara pusat. Akibatnya, struktur ekonomi di negara-negara yang bergantung tumbuh dengan pola yang sangat spesifik, yaitu berfokus pada produksi barang ekspor. Pola ini dikenal sebagai ekonomi ekspor, di mana arah pembangunan lebih ditujukan untuk

³³ *Ibid.*, hlm. 232

pasar luar negeri dibandingkan kebutuhan domestik. Kondisi inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berorientasi ke luar, yaitu pembangunan yang digerakkan oleh kepentingan dan permintaan dari negara-negara pusat, bukan oleh kebutuhan internal negara tersebut.³⁴

Bentuk ketergantungan ketiga menurut Dos Santos adalah ketergantungan teknologi-industrial, yang muncul sebagai bentuk ketergantungan modern. Pada periode pascaperang, muncul bentuk ketergantungan baru yang berkembang seiring dengan masuknya perusahaan multinasional ke negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan ini mulai berinvestasi di sektor industri yang menysasar pasar domestik, sehingga menciptakan ketergantungan yang bersifat teknologi-industrial. Perkembangan industri di negara-negara tersebut sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi yang dimonopoli oleh negara-negara pusat. Negara-negara berkembang menjadi bergantung pada impor mesin, teknologi, dan bahan baku untuk menjalankan industrinya, namun akses terhadap barang-barang ini tidak terbuka secara bebas karena dilindungi oleh paten dan dikuasai oleh perusahaan besar. Alih-alih dijual sebagai komoditas biasa, teknologi dan mesin tersebut sering kali disertakan dalam bentuk investasi langsung, disertai kewajiban pembayaran royalti atau keuntungan lainnya. Dalam banyak kasus, teknologi yang sudah tidak lagi digunakan di negara pusat justru dipindahkan ke negara berkembang sebagai modal untuk mendirikan anak perusahaan, sehingga ketergantungan teknologi dan industri terus berlanjut.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 233

Tabel 1.2 Bentuk-bentuk ketergantungan menurut Theotonio Dos Santos

No	Bentuk Ketergantungan	Definisi
1.	Ketergantungan Kolonial	Negara pusat mendominasi negara pinggiran melalui penguasaan politik dan ekonomi dalam sistem penjajahan. Aktivitas ekonomi negara pinggiran diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah,
2.	Ketergantungan Finansial-Industrial	Kegiatan ekonomi negara pinggiran bergantung pada negara maju karena perekonomian negara pinggiran difokuskan pada kegiatan ekspor dan kurang Pembangunan dalam kebutuhan domestik. Sehingga terdapat keadaan arah pembangunan perekonomian diarahkan ke pasar luar negeri dibandingkan kebutuhan domestik.
3.	Ketergantungan Teknologi-Industrial	Negara pinggiran memiliki keterbatasan teknologi dan harus bergantung pada teknologi yang sepenuhnya dikuasai perusahaan multinasional dari negara pusat. Teknologi disewakan, sehingga kelebihan nilai ekonomi tetap mengalir kembali ke negara pusat.

Berbagai bentuk ketergantungan yang dipaparkan oleh Dos Santos semuanya merupakan bagian dari struktur ketergantungan. Perbedaan struktur internal antara negara maju dan negara terbelakang menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan tersebut, dimana negara terbelakang sering kali merasa tidak adil. Ketidakadilan ini berasal dari dominasi negara-negara maju yang memiliki modal dan menentukan kebijakan investasinya. Meskipun investasi ini dianggap menguntungkan bagi negara-negara berkembang, namun terjadi ketimpangan dalam pembagian nilai surplus. Biasanya, surplus tersebut lebih banyak mengalir ke negara investor dibandingkan ke negara yang menerima investasi.

Salah satu contohnya yaitu kerjasama melalui *Belt Road Initiative* antara Kenya dengan Tiongkok. Dengan Teori Dependensi terlihat beberapa masalah yang dihadapi oleh Kenya sebagai efek kerjasama *Belt and Road Initiative* dikarenakan

Kenya yang terlalu bergantung dengan Tiongkok. Beberapa di antaranya mencakup hutang luar negeri yang sangat besar yang mana terdapat risiko ketidakmampuan pemerintah Kenya untuk membayar hutang tersebut, kurangnya transparansi dalam manajemen proyek, dampak kerusakan lingkungan yang sangat merugikan, pengalihan anggaran pemerintah, ketidaksetaraan sosial terutama dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, adanya ketergantungan pada pihak asing.³⁶

Melihat kasus tersebut, bahwa Kenya maupun Republik Demokratik Kongo menjadi ketergantungan kepada Tiongkok karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki kedua negara. Tiongkok memanfaatkan hal tersebut dengan kekuatan ekonominya sehingga Kenya dan RDK kehilangan kemandirian ekonomi karena pembiayaan dan proyek strategis dikendalikan oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memiliki kemajuan teknologi yang tidak dimiliki baik oleh kedua negara yang menjadikan mereka menukar sumber daya atau jaminan ekonomi nasional dengan proyek infrastruktur dari Tiongkok. Relasi ekonomi yang bersifat asimetris ini memperlihatkan pola eksploitasi seperti yang dijelaskan dalam teori ketergantungan.

Hubungan kerjasama Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok relevan dengan bentuk ketergantungan finansial-industrial dan teknologi-industrial, dimana Tiongkok menanamkan modalnya yang membuatnya memiliki kekuasaan ekonomi terhadap Kongo. Selain itu Tiongkok menghadirkan Perusahaan-Perusahaan multinasional di Kongo dengan hak eksplorasi mineral, dalam

³⁶ Wulandari, “*Dampak Negatif Kerjasama Ekonomi Belt And Road Initiative Kenya-China Di Tinjau Dari Teori Dependensi*”, 2024, 167-86

perjanjian *Sicomines* yang mereka sepakati, dan produk hasil industri pertambangan kobalt dikirim ke Tiongkok. Hal tersebut membuat Kongo ketergantungan karena Tiongkok memiliki teknologi terbaru pada industri nya, di sisi lain Tiongkok juga mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi Kongo tidak dapat melepaskan diri dari Tiongkok karena keterbatasan teknologi, ekonomi, dan infrastruktur dalam negeri nya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Level Analisis

Dalam penelitian ini penulis menentukan yang menjadi unit analisa adalah ketimpangan relasi antar Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok dalam kebijakan investasi infrastruktur melalui hak kelola mineral kobalt. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan level analisa negara - bangsa dan model level analisanya adalah model korelasional dilihat dari variable dependen adalah negara, sedangkan variable independennya juga negara. Faktor-faktor internal negara menentukan penjelasan tentang perilaku negara di tingkat analisis ini. Level analisis negara menjelaskan bagaimana berbagai pihak, termasuk badan legislatif, kelompok kepentingan, dan birokrat, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif, yakni jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan alasan terjadinya suatu fenomena serta menguraikan

hubungan antara dua atau lebih variabel.³⁷ Terdapat keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang dijelaskan melalui jenis penelitian ini. Untuk melakukan penelitian secara mendalam, fokus penelitian ini adalah bagaimana ketimpangan dalam kebijakan investasi infrastruktur yang diambil oleh Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok melalui hak kelola mineral kobalt.

1.6.3. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan proses penelitian untuk mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau tulisan, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan, penelitian kualitatif disebut penelitian naturalistik dengan instrumen peneliti itu sendiri.³⁸ Penggunaan pendekatan kualitatif mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan berupa fakta yang memerlukan analisis mendalam. Dalam hal ini, metode analisa kualitatif digunakan untuk menjawab mengenai ketimpangan kerjasama Tiongkok dan Kongo dalam kebijakan investasi infrastruktur nya melalui hak Kelola mineral kobalt. Jenis metode analisa data yang penulis gunakan adalah induktif, dengan melibatkan pengumpulan, pengelompokkan, dan analisis data untuk proses menemukan hasil akhir penelitian.

³⁷ Laila Febriani, "Penelitian Eksplanatif," *Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Sumber Citra Persada Jombang*, 2017, 16–19.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur atau *library research*. Studi literatur adalah metode penelitian di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Maksud dari studi literatur ini adalah bahwa setiap informasi atau data yang digunakan berasal dari buku, berita, jurnal yang tersedia secara online, tesis, laporan penelitian, berita, sosial media akun x (twitter) resmi, dan situs web resmi yang relevan dengan topik penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang tersedia.

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Penelitian ini akan berfokus mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2024. Dibagi menjadi dua bagian, pertama pada awal kesepakatan perjanjian kerjasama antara Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok pada tahun 2007-2009 mengenai kebijakan investasi infrastruktur melalui hak Kelola mineral kobalt yang diberi nama perjanjian *Sicomines*. Setelah lebih dari satu abad berlalu presiden Felix Tshisekedi melaksanakan pengonsolidasian ulang perjanjian *Sicomines* pada tahun 2021 yang berjalan hingga tahun 2024 sampai mendapatkan kesepakatan baru.

b. Batasan Materi

Penulis akan menjelaskan topik ketimpangan investasi infrastruktur Kongo pada kerjasamanya dengan Tiongkok melalui hak Kelola mineral kobalt dengan membatasi topik pada hubungan Tiongkok dengan Republik Demokratik Kongo, proses kesepakatan perjanjian *Sicomines*, upaya perjanjian revisi *Sicomines* oleh

RDK setelah satu dekade hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari perjanjian awal. Faktor ketergantungan negara Kongo terhadap negara Tiongkok dalam investasi infrastruktur dan pertambangan kobalt, serta penawaran ekonomi oleh Tiongkok yang membuat RDK tetap dalam kontrol kekuasaan Tiongkok. Penelitian ini akan membatasi pada upaya Republik Demokratik Kongo untuk memperoleh kesetaraan dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak namun dalam praktiknya masih terjebak dalam ketergantungan dengan Tiongkok.

1.7. Argumen Pokok

Kebijakan investasi infrastruktur yang diambil Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok melalui hak Kelola mineral kobalt adalah bentuk dari ketergantungan Kongo sebagai negara *periphery* yang membutuhkan bantuan kerjasama dari negara *core*. Kongo sebagai negara dunia ketiga tidak dapat memenuhi kebutuhan infratraktur negaranya sendiri karena minimnya perekonomian mereka. Tiongkok sebagai negara yang membuka investasi ke benua Afrika memberikan investasi kepada Kongo berupa pinjaman melalui perjanjian Sicomines dan menyepakati bahwa kerjasama yang dilakukan Kongo dan Tiongkok merupakan kerjasama timbal balik. Tiongkok mendapatkan akses hak Kelola mineral kobalt dan Kongo mendapatkan bantuan dana untuk infrastrukturnya. Tiongkok mulai mendapatkan hak Kelola mineral kobalt di negara Kongo setelah perjanjian kedua belah pihak disepakati. Kerja sama investasi infrastruktur melalui perjanjian *Sicomines* merefleksikan pola ketergantungan finansial-industrial dan teknologi-industrial sebagaimana dijelaskan dalam teori dependensi Theotonio Dos Santos. Seiring berjalannya waktu Tiongkok yang telah mendapatkan akses

eksplorasi mineral di Kongo memperoleh keuntungan yang besar tetapi tidak ada infrastruktur yang terlihat di negara Kongo seperti yang dijanjikan dalam perjanjian *Sicomines*. Melihat hal ini Kongo berusaha memperjuangkan hak investasinya dengan mengajukan perjanjian revisi *Sicomines* untuk memperoleh infrastruktur yang layak, namun kekuatan ekonomi Tiongkok membuat Kongo tidak berdaya sehingga sulit untuk keluar dari ketimpangan.

Tabel 1.3 Sistematika Penulisan

Judul	Pembahasan
BAB I	Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Kerangka Teori 1.5.1. Teori Ketergantungan 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Level Analisis 1.6.2. Jenis Penelitian 1.6.3. Metode Analisa Data 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 1.7. Argumen Pokok
BAB II	Relasi Kerjasama Republik Demokratik Kongo-Tiongkok Dalam Perjanjian Infrastruktur dan Pertambangan 2.1. Dinamika Kerjasama Republik Demokratik Kongo dan Tiongkok 2.2. Investasi Tiongkok di Republik Demokratik Kongo 2.3. Kesepakatan Perjanjian <i>Sicomines</i> Tahun 2007-2009 2.3.1. Revisi Perjanjian <i>Sicomines</i> pada masa pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi 2.4. Situasi Ekonomi Politik Republik Demokratik Kongo

	2.4.1. Konflik Politik di Republik Demokratik Kongo 2.4.2. Lemahnya Kapasitas Ekonomi dan Teknologi Kongo 2.4.3. Korupsi oleh pemerintah lokal Republik Demokratik Kongo
BAB III	Dinamika Ketergantungan Republik Demokratik Kongo dengan Tiongkok 3.1. Penawaran Tiongkok dalam Memperkuat Ketergantungan Ekonomi Republik Demokratik Kongo 3.1.1. Investasi & Bantuan Tiongkok di Kongo 3.1.2. Dominasi Perusahaan Tiongkok dalam Joint Venture 3.1.3. Keterbatasan Kongo Dalam Revisi Perjanjian Sicominex 3.2. Ketimpangan Relasi Kongo-Tiongkok dalam Perjanjian Sicominex
BAB IV	Penutup 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran